



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : FX. LILIK TRI MULYANTARA
- Jabatan** : KEPALA BALAI
- NHK** : 998930

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.530.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/102 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	101.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	864.510.970
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.495.510.970
III. HUTANG	Rp.	123.976.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.371.534.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNOTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **451904**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	132.250.000
1. MOBIL, Toyota MPNP/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000		
2. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
5. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	131.586.879
F. HARTA LAINNYA	Rp.	17.500.000
Sub Total	Rp.	681.336.879



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 681.336.879

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIYAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 638563

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	510.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.500.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N13L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, SUZUKI UK110NE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	116.287.482
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	640.787.482
III. HUTANG	Rp.	63.483.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	577.304.082

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : LINDA ANGGRAENI NURSANTI
- Jabatan** : BENDAHARA PENERIMA
- NHK** : 280513

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 312.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/85 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 312.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, KAWASAKI EX250S/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.911.605

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 521.411.605

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 521.411.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI DWI DARYATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 160347

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/112 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m2/215 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **194.000.000**

1. MOTOR, HONDA CBR150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MX KING Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



5. MOBIL, DAIHATSHU SIEGRA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.710.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	105.219.368
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.402.929.368
III. HUTANG	Rp.	152.553.760
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.250.375.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARNA,**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **991542**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.035.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1070 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1255 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2812 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 722 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1169 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 1249 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 1430 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 639 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 108.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOBIL, DAIHATSU XENIA XI Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.617.090
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.196.617.090
III. HUTANG	Rp.	109.217.790
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.087.399.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNUGROHO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 794429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.350.000.000
1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1160 m2/400 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, WARISAN Rp. 2.850.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HADIAH Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI COLT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 70.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.000.000		
5. MOBIL, KIA MPNP/MINIBUSI Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.900.146
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.492.900.146



III. HUTANG

Rp. 70.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.422.400.146

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.